

ADD Triwulan II Belum Cair di Polman

BPJS KESEHATAN APARAT DESA TIDAK AKTIF

POLMAN, SULBAR EXPRESS - Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II 2024 di Polman belum cair. Imbasnya, aparat desa belum gaji dari April hingga memasuki pertengahan Agustus.

KEPALA Seksi Pemerintahan Desa Tapango Barat, Herman, mengaku gajinya masih tertunda dari April lalu.

Hal ini berdampak pada iuran BPJS kesehatan yang harus menunggak dan dinyatakan tidak aktif. Padahal dirinya sedang menjalani rawat jalan di RSUD Hj Andi Depu Polewali.

"Saya tidak dilayani di rumah sakit karena BPJS saya tidak aktif. Kemudian saya menghadap ke Humas RS, juga jawabannya tidak bisa dilayani sepanjang BPJS tidak aktif," terangnya melalui telepon, Rabu 14 Agustus.

Lantaran panik, Herman kemudian mengonfirmasi bendahara dan kepala desanya melalui sambungan telepon. Ia menanyakan kenapa iuran BPJS kesehatannya belum dibayarkan.

"Katanya pak desa sama bendahara sudah dibayarkan. Saya bilang bagaimana caranya Kades bayar BPJS kalau sampai hari ini gaji kami tidak cairkan," terangnya.

Pasrah menerima kenyataan, Herman lalu meminta resep obat ke dokter RS Andi Depu, kemudian pulang membeli obat yang diresepkan dokter di apotek.

"Saya ini sudah dua tahun berobat dan dokter sarankan jangan sampai obat ini putus. Karena penyakit saya bisa kembali dari awal. Makanya saya beli obat pakai uang sendiri," ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Keuangan Pemkab Polman Muhammad Nawir membenarkan bila Pemda baru menyalurkan Dana Desa Triwulan

I untuk 144 desa di Polman.

Sementara Dana Desa Triwulan II belum disalurkan karena baru 10 desa yang mengajukan pencairan.

"ADD triwulan kedua baru 10 desa yang mengajukan pencairan, jadi memang untuk penyerapan Dana Desa, Polman yang paling terbawah di Sulbar," bebernya.

Nawir berharap, tahun ini Pemkab Polman mampu menutupi defisit utang Rp 104 miliar yang membelit daerah sejak tahun lalu.

"Utang ke kontraktor baru sebagian kita bayar. Kita upayakan di anggaran perubahan mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua tahun ini," harap Kaban Keuangan Polman.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Polman, Soepardi menyebut bahwa perangkat desa mengikuti anggaran dari Pemkab untuk mengaktifkan pembayaran iuran BPJS kesehatan.

"Memang mempengaruhi ADD karena melekat satu persen dari pemerintah desa untuk bayar iuran BPJS kesehatan aparatnya," ucapnya melalui telepon, Rabu 14 Agustus.

Kendati demikian, Soepardi menjelaskan bagi kades dan perang-



ADD triwulan kedua baru 10 desa yang mengajukan pencairan, jadi memang untuk penyerapan Dana Desa, Polman yang paling terbawah di Sulbar

MUHAMMAD NAWIR

Kaban Keuangan Pemkab Polman

kat desa yang ingin mendapatkan layanan kesehatan, mereka bisa mengaktifkan BPJS kesehatannya kembali dengan menghubungi masing-masing operator Elektronik Data Badan Usaha (E-Dabu) desanya.

"Operator E-Dabu ini kemudian mengkonfirmasi BPJS kesehatan untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya. Ini khusus bagi Kades dan perangkat desa," beber Soepardi. (ali/chm)



KASI Pemerintahan Desa Tapango Barat, Herman.